

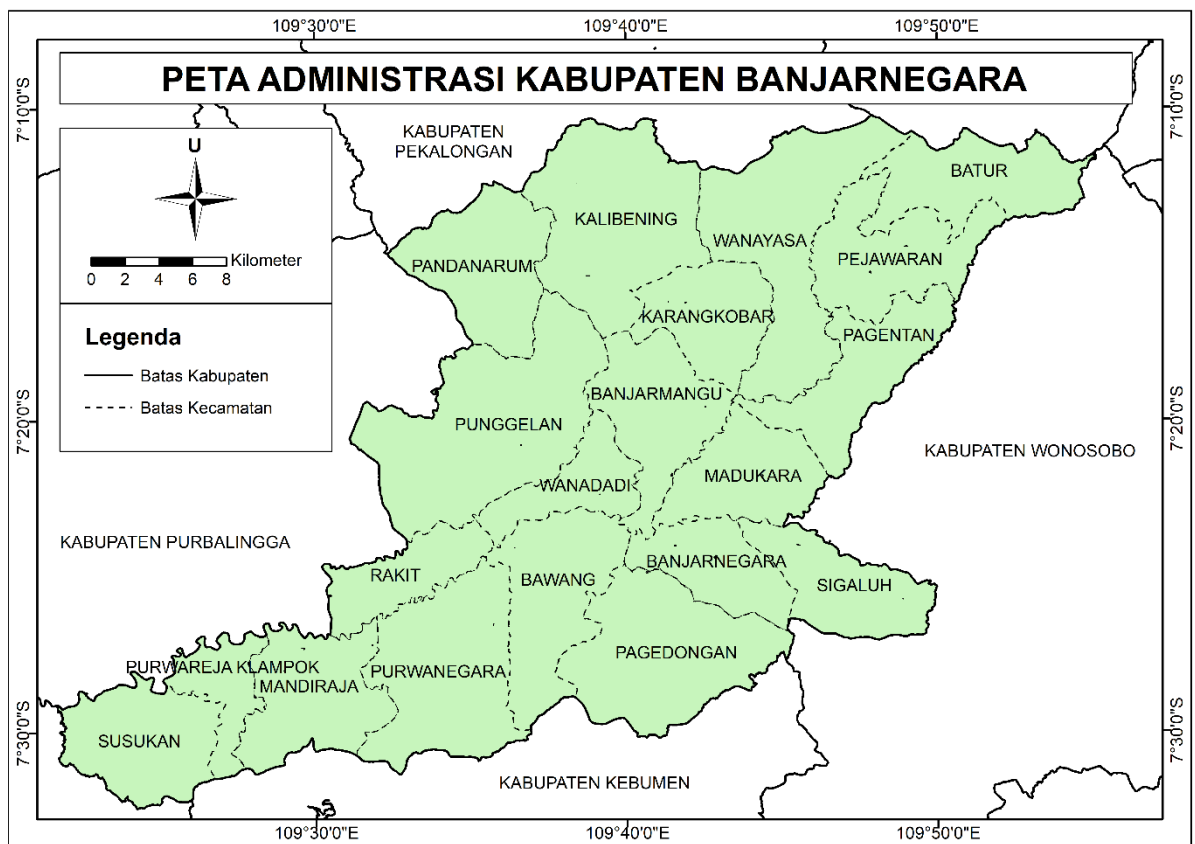
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara

2.1.1 Kondisi Geografis

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Banjarnegara



Sumber: diolah oleh peneliti

Kabupaten Banjarnegara merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Banjarnegara sebagai ibukotanya. Secara astronomi, Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah (banjarnegarakab.go.id).

Batas wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga

Bentang alam berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis pada wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Zona Utara: kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari Dataran Tinggi Dieng, Pegunungan Serayu Utara. Daerah ini memiliki relief yang curam dan bergelombang. Beberapa kawasan digunakan sebagai objek wisata, dan terdapat pula tenaga listrik panas bumi. Pada sebelah utara meliputi Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Pagentan, Pejawaran, Batur, Karangobar, Madukara.
- b. Zona Tengah: zona Depresi Serayu yang cukup subur. Bagian wilayah ini meliputi Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purworejo Klampok, Susukan, Wanadadi, Banjarmangu, Rakit.
- c. Zona Selatan: bagian dari Pegunungan Serayu yang merupakan daerah pegunungan dengan relief curam. Bagian wilayah ini adalah Kecamatan Pagedongan.

2.1.2 Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah

Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara (banjarnegarakab.go.id).

Kabupaten Banjarnegara saat ini dipimpin oleh PJ Bupati Tri Harso Widirahmanto, S.H. yang dilantik pada 22 Mei 2022 dan wakilnya H. Syamsudin, S.Pd., M.Pd. yang menjabat selama periode tahun 2017-2022. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah. Dalam periode 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan (banjarnegarakab.go.id):

a. Visi: Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera

b. Misi:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis.
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

2.1.3 Kependudukan

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 (jiwa)

No.	Kecamatan	Pria	Wanita	Kecamatan
	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	SUSUKAN	32.502	31.983	64.485
2.	PURWAREJA KLAMPOK	24.377	24.116	48.493
3.	MANDIRAJA	40.773	40.021	80.794
4.	PURWANEGARA	42.435	41.762	84.197
5.	BAWANG	32.878	32.103	64.981
6.	BANJARNEGARA	35.157	34.840	69.997
7.	SIGALUH	16.433	16.112	32.545
8.	MADUKARA	23.717	22.878	46.595
9.	BANJARMANGU	23.920	22.758	46.678
10.	WANADADI	17.516	17.220	34.736
11.	RAKIT	28.008	27.343	55.351
12.	PUNGGELAN	46.156	43.988	90.144
13.	KARANGKOBAR	16.556	15.559	32.115
14.	PAGENTAN	20.118	19.120	39.238
15.	PEJAWARAN	23.325	21.768	45.093
16.	BATUR	21.493	20.194	41.687
17.	WANAYASA	26.307	24.647	50.954
18.	KALIBENING	24.177	23.241	47.418
19.	PANDANARUM	11.905	11.373	23.278
20.	PAGEDONGAN	22.301	21.238	43.539
Jumlah Total		530.054	512.264	1.042.318

Sumber: dindikcapil.banjarnegarakab.go.id

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (dindikcapil.banjarnegarakab.go.id), jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.042.318 jiwa yang terdiri dari 530.054 penduduk laki-laki dan 512.264 penduduk perempuan. Angka ini bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun

2021 yang berjumlah 1.040.008 jiwa meningkat sebesar 0,22 persen atau bertambah sebanyak 2.310 jiwa. Berdasarkan *sex ratio*, penduduk di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2022 lebih banyak jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

2.2 Gambaran Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu instansi pemerintah daerah dari 44 instansi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara terletak di Jl. Letnan Karjono No.193, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah, Kode Pos 53412 (dinsospppa.banjarnegarakab.go.id).

2.2.1 Visi dan Misi Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara

Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki visi dan misi organisasi karena merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga visi dan misinya terafiliasi dengan Kabupaten Banjarnegara yang meliputi:

1. Visi

Visi Kabupaten Banjarnegara adalah “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

2. Misi

- a. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis.
- b. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.
- c. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.
- d. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.
- e. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara

1. Tugas Pokok Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara

Dinsos mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Fungsi Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara

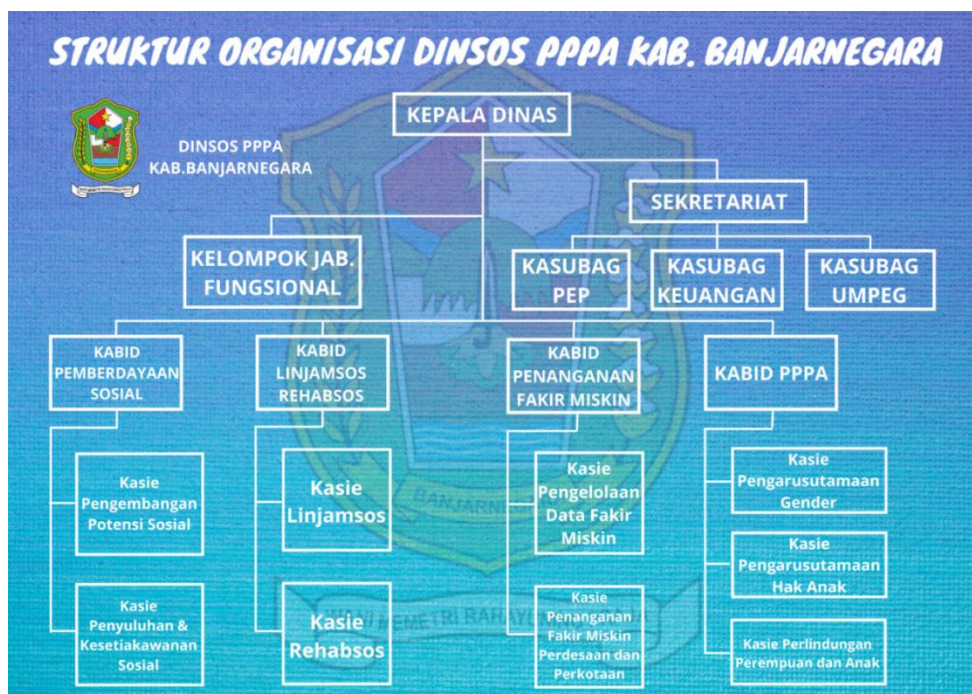
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi dan Pendidikan Pegawai Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara



Sumber: dinsospppa.banjarnegarakab.go.id

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S1 (Sarjana)	20	66,67
2.	D3 (Diploma)	1	3,33
3.	SMA/Sederajat	8	26,67
4.	SD/Sederajat	1	3,33
Total		30	100

Sumber: dinsospppa.banjarnegarakab.go.id

Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh tingkat S1 (Sarjana) sebanyak 66,67% dan diikuti oleh tingkat SMA/Sederajat sebanyak 26,67%, sedangkan tingkat D3 (Diploma) dan SD/Sederajat masing-masing sebanyak 3,33%.

2.2.4 Pelayanan Umum di Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat menggunakan fasilitas publik, seperti jasa ataupun bukan jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan. Penerima pelayanan publik adalah masyarakat, baik individual maupun kelompok serta mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara memiliki empat unit pelayanan, yaitu: Bidang Pemberdayaan Sosial; Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial; Bidang Pendataan dan Penanganan Kemiskinan; dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun jenis pelayanan yang dimiliki oleh Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara, adalah sebagai berikut:

1. Bantuan JPST Bidang Kesehatan: jenis pelayanan ini ditujukan untuk orang sakit dan menjalani rawat jalan, rawat inap, dan/atau mengalami persalinan di PPK; Psikotik; Orang terlantar; Penghuni panti sosial; dan Korban bencana.
2. Bantuan JPST Bidang Pendidikan: jenis pelayanan ini ditujukan untuk anak usia sekolah (SD, SMP, SMA/Sederajat) dari keluarga miskin/rentan; Anak keluarga miskin/rentan lulusan sekolah menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah; Anak putus sekolah dari keluarga miskin/rentan; dan Anak keluarga miskin/rentan miskin berprestasi dan diterima perguruan tinggi.
3. Bantuan JPST Bidang Sosial: layanan yang diberikan adalah Santunan anak terlantar atau anak balita terlantar; Santunan lanjut usia terlantar; Bantuan

alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia; Bantuan operasional bagi keluarga miskin yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit; Pemberian bantuan jaminan hidup bagi korban bencana yang mengungsi; dan Santunan penyandang disabilitas berat.

4. Reaktivitasi KIS PBI JK.
5. Pendaftaran Perpanjangan Surat Tanda Daftar LKS: jenis pelayanan untuk perpanjangan Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
6. Pemberian Surat Keterangan DTKS.
7. Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak: jenis pelayanan untuk pengaduan korban kekerasan berbasis gender dan anak (pengaduan/konsultasi/konseling dan pemulangan reintegrasi).
8. Pelayanan Penanganan Anak dengan Kaki Pengkor (*Clubfoot*): layanan yang diberikan adalah rehabilitasi medis atau pengobatan dan bantuan kaki palsu atau *prothese*.